

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI TENGAH KRISIS MORAL DIGITAL: TAWARAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN NILAI ERA *POST TRUTH*

Suratih Muhamad Karo

Mesgister Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Politik,
Universitas Negeri Yogyakarta
e-mail: suratihmuhamad.2024@student.uny.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memunculkan krisis moral digital, terutama di kalangan generasi muda sebagai pengguna utama media sosial. Fenomena post-truth memperparah kondisi ini dengan menempatkan emosi dan keyakinan pribadi di atas fakta objektif dalam membentuk opini publik. Krisis ini menuntut respons pendidikan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membekali peserta didik dengan nilai-nilai tanggung jawab dan integritas sebagai bekal menghadapi tantangan moral di dunia digital. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menawarkan model integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran PKn, dengan menekankan metode debat, refleksi diri, dan proyek aksi digital. Tujuannya adalah membentuk karakter warga negara digital yang etis, kritis, dan bertanggung jawab. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai dalam PKn mampu memperkuat ketahanan moral peserta didik serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menyaring informasi dan berinteraksi secara bijak di ruang digital.

Kata kunci: *krisis moral digital, Pendidikan Kewarganegaraan, warga digital*

Abstract

The rapid development of digital technology has triggered a digital moral crisis, particularly among the younger generation as the primary users of social media. The post-truth phenomenon exacerbates this condition by prioritizing emotions and personal beliefs over objective facts in shaping public opinion. This crisis demands an educational response that addresses not only cognitive but also moral and ethical aspects. Citizenship Education (PKn) plays a strategic role in equipping students with the values of responsibility and integrity to face moral challenges in the digital world. Using a descriptive qualitative approach through library research, this study offers a conceptual model for integrating value education into PKn learning, emphasizing methods such as classroom debates, self-reflection, and digital action projects. The aim is to shape digital citizens who are ethical, critical, and responsible. The findings suggest that value integration in PKn strengthens students' moral resilience and enhances their ability to filter information and engage wisely in digital spaces.

Keywords: digital moral crisis, post-truth, citizenship education, digital citizenship



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara hidup manusia secara signifikan, terutama dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi. Keberadaan media sosial menjadi salah satu contoh utama bagaimana teknologi mengubah cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Meskipun menawarkan kemudahan dan kecepatan, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait dengan moralitas dan etika dalam dunia maya. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah krisis moral digital, yang semakin diperburuk oleh fenomena *post-truth* (Arifin & Fuad, 2021). Fenomena *post-truth* merujuk pada kondisi di mana fakta objektif dan kebenaran ilmiah kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik. Sebaliknya, emosi, keyakinan pribadi, dan narasi yang dibangun berdasarkan pandangan individu atau kelompok sering kali menjadi lebih dominan dalam membentuk opini (Glasser, 2016). Dalam dunia digital, hal ini menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks menjadi semakin mudah diterima dan dipercaya. Dampaknya, publik sering kali terperangkap dalam informasi yang menyesatkan, yang mengarah pada kesalahpahaman dan perpecahan sosial (Fatwa MUI, 2017).

Kondisi ini menjadi semakin kompleks di Indonesia yang merupakan negara plural, baik dari segi etnis, budaya, agama, maupun pandangan politik. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru bisa menjadi celah perpecahan jika tidak diiringi dengan kesadaran moral dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Informasi yang keliru atau dipelintir dengan muatan provokatif sangat berpotensi memperuncing konflik sosial dan melemahkan kohesi antarwarga negara. Menurut McLaughlin (1992), pendidikan kewarganegaraan harus tidak hanya berfokus pada transmisi pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga pada pengembangan karakter moral dan keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.

Dalam konteks ini, penting untuk membekali warga negara, khususnya generasi muda, dengan pemahaman tentang digital citizenship atau *kewargaan digital*. Digital citizenship mencakup kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi secara etis, bertanggung jawab, dan aman, serta berpartisipasi aktif dalam ruang digital dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan (Ribble, 2011). Kesadaran akan hak dan kewajiban digital, literasi informasi, perlindungan data pribadi, hingga etika berkomunikasi di internet menjadi elemen penting dalam membentuk karakter warga digital yang bijak. Tanpa kompetensi ini, generasi muda akan rentan terjebak dalam perilaku tidak etis seperti menyebarkan hoaks, melakukan perundungan siber, atau intoleransi digital yang merusak tatanan sosial.

Generasi muda sebagai pengguna utama media sosial menjadi kelompok paling rentan terhadap arus informasi yang menyesatkan. Mereka tidak hanya kesulitan menyaring informasi yang valid, tetapi juga terekspos pada budaya hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku tidak etis lainnya yang mencerminkan krisis moral digital (Mastel, 2019). Dalam menghadapi masalah tersebut, pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), memegang peranan penting. PKn tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga untuk membentuk karakter dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan yang mampu mengintegrasikan pendidikan nilai akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk individu yang mampu mengatasi tantangan yang ada di dunia digital. Salah satu pendekatan nilai dan moral yang digunakan dalam pembelajaran PKn seperti tanggung jawab dan integritas menjadi sangat penting

untuk ditanamkan. Secara teoritis, tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran individu untuk menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran atas konsekuensi dari tindakannya terhadap diri sendiri maupun orang lain (Hurlock, 1978). Dalam konteks digital, ini berarti peserta didik perlu dibimbing untuk menyadari akibat dari tindakan mereka di ruang maya, seperti menyebarkan informasi tanpa verifikasi atau berkomentar secara sembrono. Sementara itu, integritas menurut Carter (1996) adalah kualitas dari seseorang yang konsisten antara nilai, prinsip, dan tindakannya, meskipun dalam kondisi yang penuh tekanan. Individu yang memiliki integritas akan menjunjung tinggi kejujuran dan tidak mudah terpengaruh oleh opini mayoritas atau tren sesat di media sosial. Integritas dalam dunia digital mendorong peserta didik untuk bersikap jujur, menghargai perbedaan, dan konsisten dalam menjaga etika, bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan nilai ke dalam PKn, sehingga peserta didik tidak hanya memahami teori kewarganegaraan, tetapi juga dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia maya. Pendidikan nilai yang dimaksud tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga aspek sikap dan perilaku yang dapat membimbing peserta didik dalam menghadapi permasalahan sosial, khususnya dalam berinteraksi secara etis di dunia digital. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pendekatan konseptual yang mengintegrasikan pendidikan nilai tanggung jawab dan integritas dalam PKn sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis moral digital yang terjadi di era *post-truth*. Melalui integrasi pendidikan nilai ini, diharapkan peserta didik akan lebih siap untuk menyaring informasi dengan bijak, bertindak lebih etis, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun di dunia digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk merumuskan tawaran konseptual terkait integrasi pendidikan nilai, khususnya nilai tanggung jawab dan integritas ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai respons terhadap krisis moral digital di era *post-truth*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen digital yang membahas isu-isu terkait krisis moral digital, pendidikan nilai, media sosial, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria aktualitas (terbit dalam lima tahun terakhir), relevansi dengan fokus penelitian, dan kredibilitas sumber.

Temuan dan Pembahasan

Krisis Moral Digital di Era Post-Truth dan Dampaknya terhadap Kehidupan Bernegara

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, memperoleh informasi, dan membentuk persepsi tentang realitas sosial. Dunia maya tidak lagi menjadi ruang pelengkap, melainkan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsekuensi dari realitas ini adalah munculnya tantangan-tantangan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut dimensi moral, sosial, dan politik. Era digital melahirkan fenomena yang disebut sebagai era *post-truth*. Dalam konteks ini, kebenaran menjadi relatif dan dapat dikonstruksi sesuai kepentingan, sehingga ruang publik digital sering kali dipenuhi oleh informasi manipulatif, hoaks, dan narasi provokatif yang tidak berdasar. Sebuah studi yang

dilakukan oleh Oxford Internet Institute (OII) pada tahun 2017-2018 menyatakan bahwa disinformasi dan propaganda digital mengalami peningkatan tajam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Studi tersebut menyoroti peran media sosial dalam memperkuat polarisasi sosial dan politik, terutama melalui penggunaan "pasukan siber" yang menyebarkan informasi palsu untuk mendukung politikus atau partai tertentu, serta menyerang oposisi.

Di Indonesia, tantangan era post-truth terasa lebih kompleks karena menyentuh langsung ke dalam struktur sosial yang multikultural. Keberagaman etnis, budaya, dan agama, yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa, justru menjadi celah yang mudah dieksploitasi dalam disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas. Laporan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel, 2019) Menurut riset yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Februari 2017, penyebaran hoax paling banyak diterima melalui media sosial yang mencapai 92,4 persen. Media sosial yang dimaksud di sini termasuk Facebook, Twitter, Instagram, Path, Line, WhatsApp, dan Telegram. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menunjukkan bahwa 62% pengguna internet di Indonesia pernah melihat kekacauan informasi di ruang digital, termasuk hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian (Detik, 2024). Selain itu, berdasarkan survei Katadata Insight Center bersama Kominfo pada tahun 2022, sebanyak 72,6% masyarakat Indonesia mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama, yang meningkatkan risiko paparan terhadap informasi yang belum diverifikasi (Katadata, 2023).

Menurut data dari *Digital 2021: Indonesia* yang dipublikasikan oleh We Are Social dan Hootsuite (2021), Indonesia mencatatkan lebih dari 175 juta pengguna internet pada awal 2021, dengan 170 juta di antaranya aktif di media sosial. Angka ini mencerminkan penetrasi digital yang sangat tinggi, namun juga menunjukkan betapa banyaknya individu yang dapat dengan mudah terpapar pada konten yang tidak terverifikasi. Menurut laporan ini, lebih dari 50% pengguna media sosial Indonesia mengakses berita dan informasi politik melalui platform digital, yang semakin mempengaruhi sikap dan pandangan mereka terhadap isu-isu sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi membawa banyak peluang, ia juga membawa risiko besar terkait dengan penyebaran informasi yang tidak akurat.

Lebih jauh, krisis ini tidak hanya disebabkan oleh maraknya disinformasi, tetapi juga oleh rendahnya literasi digital dan lemahnya kesadaran etis dalam penggunaan teknologi informasi. Unesco (2018), tantangan utama di era digital bukan hanya terletak pada akses terhadap informasi, tetapi juga pada kemampuan individu untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Banyak individu, terutama generasi muda, seringkali memandang internet sebagai alat hiburan atau ekspresi diri, tanpa menyadari dampak sosial dan moral dari jejak digital yang mereka tinggalkan.. Menurut **Livingstone (2018)**, literasi digital di era informasi yang berlebihan memerlukan kemampuan untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara kritis, serta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak sosial dan moral dari interaksi digital.

Krisis moral digital, dengan demikian, bukan sekadar persoalan teknis atau kesalahan algoritma media sosial, melainkan mencerminkan degradasi nilai dan lemahnya fondasi etika dalam masyarakat digital. Ketika nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati tidak ditanamkan secara konsisten dalam pendidikan dan praktik kehidupan sehari-hari, maka ruang digital menjadi lahan subur bagi penyebaran narasi-narasi yang merusak keadaban publik.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dampak dari krisis ini cukup serius. Kepercayaan terhadap institusi negara melemah karena wacana publik dibentuk berdasarkan misinformasi. Diskursus politik menjadi emosional dan irasional, sering kali menjauh dari substansi kebijakan. Lebih dari itu, relasi antarwarga negara menjadi renggang akibat prasangka dan polarisasi yang dipicu oleh dunia digital. Hal ini sejalan dengan temuan dari *Digital Civility Index* Microsoft (2021) yang mencatat bahwa tingkat kesopanan digital masyarakat Indonesia menurun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dipicu oleh penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan serangan personal di dunia maya.

Oleh sebab itu, tantangan moral digital tidak dapat diserahkan hanya pada pemerintah atau platform teknologi. Institusi pendidikan, terutama melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), memiliki peran strategis untuk membangun fondasi etika digital dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan generasi muda. PKn harus hadir tidak hanya sebagai mata pelajaran normatif, tetapi sebagai wahana reflektif-kritis yang membentuk warga negara digital yang dapat beradaptasi di era digital (Khaurunisa, 2024). Ini termasuk penguatan nilai tanggung jawab sosial, toleransi, literasi media, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi yang tersebar di ruang digital.

Dengan demikian, krisis moral digital di era post-truth merupakan tantangan serius yang memerlukan respons pendidikan yang sistematis dan transformatif. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab tidak hanya mengajarkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan etika publik sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang tangguh dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan ini. Pentingnya pendidikan nilai dalam PKn semakin nyata, terutama terkait dengan perilaku digital yang semakin kompleks. Sebuah penelitian oleh Studi oleh Alamsyah et al. (2024) meneliti integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan karakter siswa di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam cenderung memiliki ketahanan moral yang lebih kuat terhadap pengaruh negatif di dunia maya. Mereka juga menunjukkan kecenderungan lebih aktif dalam menggunakan teknologi digital secara produktif, seperti untuk kegiatan belajar, berdakwah, dan menyebarkan konten positif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan karakter kontekstual yang menyatu dengan nilai-nilai religius dan budaya lokal sebagai upaya membentuk warga digital yang bertanggung jawab. Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa pendidikan nilai yang terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu bukan hanya membentuk sikap kewarganegaraan yang baik, tetapi juga berperan dalam membangun warga negara digital yang bijak, yang dapat mengatasi tantangan informasi yang salah dan dampak sosial negatif yang sering muncul di dunia maya.

Namun, meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi pendidikan nilai dalam PKn sering kali masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terhubung dengan tantangan digital yang dihadapi oleh siswa. Oleh karena itu, ada urgensi untuk merevisi kurikulum PKn agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi dampak negatif dari era digital.

Urgensi Integrasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang berintegritas. Selain mengajarkan struktur kenegaraan, hukum, dan sistem politik, PKn diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan bernegara, seperti tanggung jawab, kejujuran, integritas, dan rasa saling menghormati. Menurut McLaughlin (1992), tujuan utama pendidikan

kewarganegaraan bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan tentang negara, tetapi lebih penting lagi untuk membentuk karakter moral dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik. PKn harus mampu melahirkan warga negara yang tidak hanya tahu tentang hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar dan etis dalam tindakan mereka.

Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Murtado & Dkk. (2021), PKN dikenal dengan istilah "civic," yang bertujuan untuk membina dan membentuk warga negara yang baik serta memahami hak dan kewajiban mereka. Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan formal yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1949 tentang Status Warga Negara. PKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 45, yang juga dijelaskan lebih lanjut dalam sumber hukum lainnya (Wiranataputra, 2021; Fathurrohman, 2019).

PKn memiliki tujuan untuk membentuk siswa yang dapat berpikir rasional, kreatif, dan kritis dalam memahami isu kewarganegaraan. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan pribadi yang positif dan demokratis, serta mempersiapkan siswa untuk berinteraksi dengan bangsa lain dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat serta bernegara dengan nilai anti-korupsi (Puspita, 2014). Moralitas sebagai sistem nilai yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya hidup dengan baik sangat terintegrasi dalam konsep ini. Moralitas mencakup norma-norma yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui agama atau budaya tertentu dan berkaitan dengan kualitas tindakan manusia dalam kebaikan atau kejahatan (Tanshil, 2012).

Di tengah era post-truth yang dipenuhi dengan informasi tidak terverifikasi, hoaks, dan manipulasi fakta, tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan semakin kompleks. Nilai-nilai moral dan etika sering kali tergerus oleh kekuatan opini pribadi yang lebih dominan dibandingkan dengan fakta objektif. Era post-truth menciptakan ruang yang sangat rawan bagi penyebaran informasi yang menyesatkan, yang pada gilirannya memperburuk polarisasi sosial dan ketegangan politik di masyarakat. Media sosial menjadi arena utama dalam berinteraksi, dan masyarakat digital sering kali lebih cenderung dipengaruhi oleh perasaan, emosi, atau keyakinan pribadi daripada oleh fakta yang rasional. Fenomena ini menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan.

Integrasi pendidikan nilai dalam PKn menjadi semakin penting untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menyaring informasi dan bertindak secara etis dalam ruang digital. Tanpa penguatan nilai-nilai dasar yang kuat, generasi muda berpotensi terjebak dalam perilaku digital yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau terlibat dalam polarisasi sosial yang merugikan tatanan kebangsaan. Hurlock (1978) menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran individu akan konsekuensi dari tindakannya terhadap diri sendiri dan masyarakat. Dalam konteks digital, tanggung jawab ini mencakup kemampuan untuk berhati-hati dalam memilih informasi yang dikonsumsi dan disebar, serta memahami dampak sosial dari interaksi digital yang dilakukan. Setiap tindakan daring, baik berupa komentar, unggahan, atau penyebaran informasi, membawa dampak yang dapat mempengaruhi orang lain secara luas.

Pendidikan nilai juga sangat berperan dalam memperkuat integritas moral dalam kehidupan digital. Carter (1996) mendefinisikan integritas sebagai konsistensi antara prinsip dan tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki integritas digital akan tetap bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika meskipun ada tekanan sosial atau godaan untuk mengikuti tren

negatif di media sosial. Integritas ini sangat penting dalam menghadapi berbagai bentuk tekanan dari dunia maya yang sering kali mendorong perilaku tidak etis, seperti menyebarkan informasi palsu atau melakukan serangan pribadi terhadap individu atau kelompok tertentu.

Tawaran Konseptual: Model Integrasi Pendidikan Nilai Tanggung Jawab dan Integritas dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menghadapi Krisis Moral Digital

Di tengah berkembangnya teknologi digital dan pesatnya informasi yang tersebar di dunia maya, krisis moral digital menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran yang sangat penting untuk membantu siswa tidak hanya memahami teori kewarganegaraan, tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai yang mencakup tanggung jawab, integritas, dan etika di dunia digital. Oleh karena itu, penting bagi PKn untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut secara holistik dan kontekstual agar siswa dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mampu menghadapi tantangan moral dalam dunia maya.

Menurut McLaughlin (1992), pendidikan kewarganegaraan harus melampaui pengajaran teori-teori formal dan memfokuskan pada pembentukan karakter moral serta kemampuan untuk berpikir kritis. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan nilai-nilai etika akan memberikan siswa alat untuk menilai dan mengatasi tantangan sosial dan politik yang mereka hadapi, baik dalam dunia nyata maupun digital. Konsep ini sejalan dengan pandangan John Dewey, yang menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada pengalaman dan refleksi dalam membentuk individu yang berpikir kritis dan bertanggung jawab (Dewey, 1938). Melalui pembelajaran yang melibatkan refleksi aktif, siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan digital saat ini.

Model integrasi pendidikan nilai dalam PKn untuk menghadapi krisis moral digital ini dapat dibangun dengan pendekatan yang berbasis pada keterlibatan aktif siswa. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah debat dalam kelas, yang memungkinkan siswa untuk terlibat dalam diskusi kritis tentang isu-isu sosial dan moral yang relevan dengan kehidupan digital mereka. Metode debat memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir analitis dan menanggapi berbagai perspektif yang ada, serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Isu-isu seperti hoaks, perundungan siber, dan ujaran kebencian yang sering muncul di media sosial dapat menjadi topik yang relevan dalam debat, di mana siswa tidak hanya mempresentasikan pendapat mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum, berpikir logis, dan mendengarkan dengan penuh perhatian.

Selain debat, metode refleksi diri juga sangat efektif untuk mengembangkan kesadaran moral dan tanggung jawab digital siswa. Dengan menggunakan refleksi diri, siswa dapat lebih mendalam dalam memahami dampak dari tindakan mereka di dunia maya. Mereka dapat menulis jurnal atau mengikuti sesi diskusi yang memungkinkan mereka untuk merefleksikan pengalaman mereka terkait penggunaan teknologi, serta menyadari dampak sosial yang ditimbulkan dari interaksi daring mereka. Menurut Boud, Keogh, dan Walker (1985), pembelajaran berbasis refleksi tidak hanya melibatkan pengakuan atas pengalaman yang telah terjadi, tetapi juga mendorong siswa untuk menilai pengalaman tersebut secara kritis. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, refleksi memungkinkan siswa untuk mengaitkan nilai-nilai seperti tanggung jawab dan integritas dengan pengalaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia digital. Proses ini

membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri yang lebih mendalam dan meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan etis, terutama dalam menghadapi tantangan moral yang muncul dalam interaksi digital. Boud et al. (1985) juga menyatakan bahwa refleksi memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang dampak tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain, yang sangat relevan dalam pengembangan karakter moral di era digital. Selain itu, penelitian Boud, Keogh, dan Walker (1985) juga menegaskan bahwa metode refleksi diri dapat memperkuat kemampuan siswa dalam mengevaluasi tindakan mereka dan merencanakan perbaikan yang lebih etis. Hal ini penting untuk membekali siswa dengan kapasitas moral yang kuat dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan di dunia digital.

Kedua, Proyek aksi digital dapat menjadi komponen penting lainnya dalam model integrasi pendidikan nilai ini. Dalam proyek ini, siswa diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan nyata yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Proyek seperti kampanye anti-hoaks, pembelajaran tentang privasi data, atau program untuk memerangi perundungan siber dapat menjadi wadah bagi siswa untuk tidak hanya mempelajari nilai-nilai tanggung jawab dan integritas, tetapi juga menerapkannya dalam dunia digital secara langsung. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam proyek berbasis nilai, yang juga mencakup aktivitas di luar kelas, dapat memperkuat pemahaman mereka tentang konsekuensi sosial dan moral dari tindakan mereka di dunia maya.

Namun tantangan dunia digital, terutama yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak akurat dan pengaruh buruk dari media sosial, memerlukan respon yang tidak hanya berupa pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis untuk menavigasi dunia maya secara etis. Oleh karena itu, model integrasi nilai kewarganegaraan yang menggabungkan debat, refleksi diri, dan proyek aksi digital berperan penting dalam membekali siswa dengan keterampilan dan karakter moral yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis pada model integrasi nilai-nilai tanggung jawab dan integritas akan membantu siswa untuk menghadapi krisis moral digital dengan kesiapan yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga menanamkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral ini menjadi garda depan dalam membentuk warga negara yang berkarakter kuat dan siap untuk menghadapi tantangan moral di dunia digital yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di era digital menghadapi tantangan besar akibat krisis moral digital, terutama dalam konteks post-truth yang membuat fakta objektif sering diabaikan. Generasi muda sebagai pengguna utama media sosial sangat rentan terhadap informasi palsu, ujaran kebencian, dan perilaku tidak etis di dunia maya. Oleh sebab itu, PKn tidak hanya perlu mengajarkan teori kenegaraan, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan nilai, khususnya tanggung jawab dan integritas. Integrasi nilai ini bertujuan membentuk karakter siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan etis. Nilai tanggung jawab mendorong siswa untuk menyadari konsekuensi dari setiap tindakan digital mereka,

sedangkan nilai integritas menuntut konsistensi antara prinsip dan perilaku, bahkan dalam tekanan sosial media. Dengan membekali siswa dengan kedua nilai tersebut, diharapkan mereka tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang cerdas, tetapi juga warga negara digital yang bertanggung jawab.

Model konseptual yang ditawarkan mengusulkan pendekatan aktif, seperti debat isu-isu digital, refleksi diri, dan proyek aksi digital. Pendekatan ini memungkinkan siswa terlibat secara kritis, memahami dampak sosial dari interaksi digital, dan menginternalisasi nilai-nilai moral dalam pengalaman nyata. Melalui pendidikan nilai yang kontekstual dan aplikatif, PKn dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi krisis moral digital dan membentuk generasi yang beretika, toleran, dan kritis dalam dunia digital. Dengan demikian, memperbarui PKn untuk lebih responsif terhadap tantangan digital adalah langkah penting untuk membangun demokrasi yang sehat, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga keutuhan bangsa di era global yang serba cepat ini.

Referensi

- [1]. Alamsyah, A. A., & Maulana, A. M. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Karakter di Era Digital. *Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(1), 12–16.
- [2]. Arifin, N. F., & Fuad, A. J. (2021). Dampak Post-Truth di Media Sosial. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(3), 376-378. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1430>
- [3]. Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1985). *Reflection: Turning experience into learning*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315059051>
- [4]. Carter, S. L. (1996). *Integrity*. New York: HarperCollins.
- [5]. Dewey, J. (1910). *How we think*. Global Grey. Retrieved from <https://www.globalgreybooks.com/how-we-think-ebook.html>
- [6]. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
- [7]. Fathurrohman, F. (2019). Implementasi Pendidikan Moral Di Sekolah Dasar. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 3(1), 79–86. <https://doi.org/10.21067/jbpd.V3i1.2929>
- [8]. Glasser, S.B. (2016). Covering Politics in a Post-Truth America. <https://www.brookings.edu/essay/covering-politics-in-a-post-truth-america>.
- [9]. Hurlock, E. B. (1978). *Child Development* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- [10]. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, & Katadata Insight Center. (2022). *Laporan Survei Penggunaan Media Sosial di Indonesia*.
- [11]. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, & Katadata Insight Center. (2022). *Laporan Survei Penggunaan Media Sosial di Indonesia*.
- [12]. Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- [13]. Mastel. (2019). *Wabah HOAX Nasional 2019*. Masyarakat Telematika Indonesia. <https://mastel.id/wp-content/uploads/2019/04/Survey-Hoax-Mastel-2019-10-April-2019.pdf>
- [14]. McLaughlin, T. H. (1992). Citizenship, diversity and education: A philosophical perspective. *Journal of Moral Education*, 21(3), 235–250. <https://doi.org/10.1080/0305724920210307>
- [15]. Microsoft. (2021). *Digital Civility Index 2021*. Microsoft Corporation.
- [16]. Puspita, D. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengembangkan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 58–68.

- [17]. Riska Armianti, Ndona, Y. ., & Saragi, D. . (2024). Peran Pendidikan Nilai dalam PKn untuk Membentuk Karakter Siswa di Era Digital: The Role of Values PKn to Shape Students' Character in the Digital Era. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(02), 707-716. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i02.4719>
- [18]. Tanshil, S. Wahyuni. (2012). Model Pembinaan Pendidikan Karakter Pada Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Membangun Kemandirian Dan Disiplin Santri. In *Penelitian Pendidikan* (Vol. 13, Issue 2, Pp. 1–18).
- [19]. UNESCO. (2018). Digital literacy for all: A global framework. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- [20]. We Are Social, & Hootsuite. (2021). *Digital 2021: Indonesia*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>
- [21]. Detik. (2024). Menkominfo: 62% pengguna internet lihat kekacauan informasi. (Online) Retrieved From: <https://news.detik.com/berita/d-7154563/menkominfo-62-pengguna-internet-lihat-kekacauan-informasi>
- [22]. Katadata: Katadata. (2023, Januari 5). *Warga RI lebih percaya media sosial ketimbang pers jelang pemilu 2024* (Online). Retrieved from: <https://katadata.co.id/digital/teknologi/63da0ef797429/warga-ri-lebih-percaya-media-sosial-ketimbang-pers-jelang-pemilu-2024> (Accessed 8 April 2025).
- [23]. Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). (2017). *Wabah hoax nasional*. Retrieved from: <https://mastel.id/press-release-infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/> (accessed; 7 April 2025).
- [24]. Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat, R. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(01), 1-8. Doi: <https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.675>